



Judul	: Kenaikan anggaran DPR tidak perlu
Tanggal	: Senin, 15 April 2013
Surat Kabar	: Suara Karya
Halaman	: 3

KINERJA PARLEMEN

Kenaikan Anggaran DPR Tidak Perlu

JAKARTA (Suara Karya): Peningkatan rencana anggaran DPR 2014 yang cukup signifikan ditengarai akan digunakan untuk kampanye terselubung anggota DPR. Selain itu, Kinerja DPR sebagai lembaga wakil rakyat dinilai masih rendah.

Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Ucheok Sky Khadafi mengatakan bahwa kenaikan anggaran tahun 2014 ini dilakukan tanpa terlebih dulu mengevaluasi diri sendiri. Karena, sebenarnya anggota DPR saat itu sibuk di lapangan.

"Kenaikan anggaran DPR sebetulnya tidak perlu dan tidak ada urgensinya. Karena, tahun 2014 adalah tahun di mana para anggota Dewan lebih banyak di lapangan ketimbang berkantor ke DPR," kata kemarin.

Ia juga mencurigai, anggaran reses akan dipakai oleh anggota DPR untuk ke dapil masing-masing dan berkampanye untuk pemilu legislatif 2014 mendatang. "Kalau terjadi, ini benar-benar DPR mempergunakan anggaran negara untuk kepentingan diri sendiri dalam rangka kampa-

nye diri sendiri. Ini tidak boleh dilakukan,"ujarnya.

Secara kinerja, Direktur Advokasi dan Monitoring Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Ronald Rofandi menilai bahwa merosotnya citra DPR di mata publik yang menyebabkan menurunnya citra DPR adalah menyengkut kedisiplinan.

Sebelumnya, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR mengajukan anggaran DPR tahun 2014 sebesar Rp 3, 281 triliun, naik 9,44 persen dibandingkan tahun 2013 yang sebesar Rp 2,99 triliun. Rencana anggaran tersebut disampaikan Wakil Ketua BURT Muhammad Syahfan B. Samponro dalam rapat paripurna, Jumat (12/4) kemarin. Anggaran sebesar itu akan dibagi dua, yakni untuk Satuan Kerja Dewan Rp 2,3 triliun, dan Satuan Kerja Setjen Rp 923 miliar.

Wakil Ketua BURT Muhammad Syahfan B Samponro menyampaikan hal ini dalam Rapat Paripurna DPR, Jumat (12/4). Anggaran sebesar itu akan dibagi dua yakni Satuan Kerja Dewan Rp 2,3 triliun dan Satuan Kerja Setjen Rp 923 miliar.

Untuk Satuan Kerja Dewan, anggaran terbesar untuk penguatan kelembagaan sebesar Rp 1,6 triliun, disusul untuk pelaksanaan fungsi legislasi sebesar Rp 411 miliar, kemudian pelaksanaan fungsi pengawasan Rp 257 miliar dan pelaksanaan fungsi anggaran sebesar Rp 77 miliar.

Sementara, untuk Setjen, alokasi anggaran terbesar diperuntukkan dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya sebesar Rp 470 miliar. Sementara untuk peningkatan sarana dan prasarana sebesar Rp 453 miliar.

Anggaran DPR dihasilkan dari usulan kebutuhan anggaran tahun 2014 dari seluruh alat kelengkapan dan setjen. "Selanjutnya BURT bersama Setjen telah melakukan kompilasi atas usulan yang disampaikan oleh alat kelengkapan dewan dan setjen," kata Syahfan.

Pembahasan rancangan anggaran bersama Badan Anggaran (Banggar) dilakukan pada 9 April 2013, dan selanjutnya BURT beririm surat ke pimpinan DPR tentang anggaran DPR tahun 2014. (Rully/Ant)